

BUKU

Bahari, Adib, 2010, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*,
Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Fuady, Munir 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek: Edisi Revisi*
(Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004), Bandung: PT Citra Aditya
Bakti.

Fuady, Munir 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra
Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra
Aditya Bakti.

Rianto, Adi 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

Shubhan, M. Hadi 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di*
Peradilan, Jakarta: Kencana.

Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan*
di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.

Sjahdeini, Sutan Remy 2000, *Hukum Kepailitan, Memahami*
Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998,
Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Sjahdeini, Sutan Remy 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang No.*
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*
Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press.

Grafindo.

Tiong, Oey Hoey 1985, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*,

Jakarta: Ghalia Indonesia.

Widjaja, Gunawan 2009, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta:

Forum Sahabat.

PENELITIAN/KARYA ILMIAH

Tengkano, Dino Irwin, 2007 “*Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban*

Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan (Studi Kasus PT

Ometraco di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)”, Tesis Magister

Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta.

INTERNET

Hak Kreditor Separatis Mengikuti Voting Perdamaian dalam PKPU, diakses dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57a04911956fe/hak->

[kreditor-separatis-mengikuti-voting-perdamaian-dalam-pkpu](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57a04911956fe/hak-kreditor-separatis-mengikuti-voting-perdamaian-dalam-pkpu) pada hari

Selasa, 26 Februari 2019, Pukul 13:15 WIB.

YURISPRUDENSI

Salinan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 29

Maret 2017 (Putusan PKPU).

Salinan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Juli

2017 (Putusan homologasi).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- . Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- . Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana telah diubah dengan perubahan Ke-4, Lembar Negara Tahun 2002.
- . Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- . Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- . Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889 .
- . Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78.
- . Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.